



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136
Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005 e-mail: info@uinkhas.ac.id
Website: www.uinkhas.ac.id



Jember, 06 Mei 2024

Yth. Kantor Pelayanan Perbendaharaan
Negara Tipe A1 di-
Jember

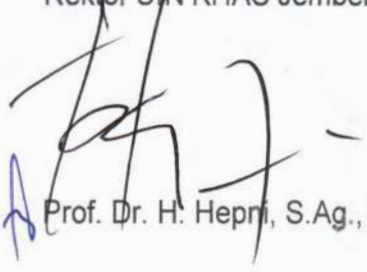
SURAT PENGANTAR
Nomor: 2469/Un.22/05/2024

No	Naskah Dinas/Barang	Banyaknya	Keterangan
1	Berkas Catatan Atas Laporan Keuangan UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Audited Tahun 2023	1 Berkas	Dikirim dengan hormat untuk mendapatkan penyelesaian sebagaimana mestinya. Terima kasih.

Diterima tanggal.....

Penerima,
.....
.....

Pengirim,
Rektor UIN KHAS Jember


Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M

No Telp.
No. Faxsimile.

Catatan: Setelah diterima, lembar kedua dikirimkan kembali kepada pengirim



Laporan Keuangan Tahunan (Audited) 2023

**Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq
Jember**

Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023



KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian/Lembaga yang dipimpinnya.

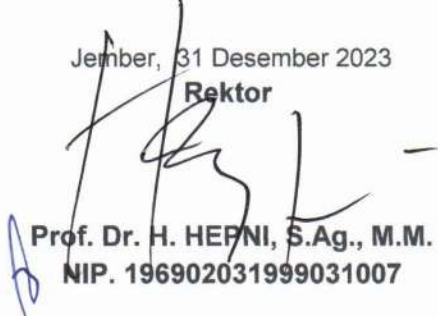
Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember adalah salah satu entitas akuntansi yang berbentuk Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Agama yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Jember, 31 Desember 2023

Rektor


Prof. Dr. H. HEFNI, S.Ag., M.M.
NIP. 196902031999031007

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	ii
Ringkasan	iv
Daftar Tabel	vi
Daftar Grafik	vii
I Laporan Realisasi Anggaran	1
II Neraca	2
III Laporan Operasional	3
IV Laporan Perubahan Ekuitas	4
V Laporan Arus Kas	2
VI Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih	7
VII Laporan Perubahan Ekuitas	8
V Catatan Atas Laporan Keuangan	
A. Penjelasan Umum	5
B. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	13
C. Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca	21
D. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional	29
E. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Arus Kas	35
F. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih	38
G. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	39
H. Pengungkapan Penting Lainnya	42
VI. Lampiran dan Daftar	

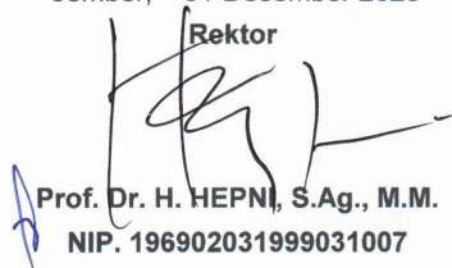
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember sebagai Badan Layanan Umum yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Jember, 31 Desember 2023

Rektor



Prof. Dr. H. HEPNI, S.Ag., M.M.

NIP. 196902031999031007

RINGKASAN LAPORAN

Laporan Keuangan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Tahun 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Keuangan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2023 adalah sebesar Rp81.828.859.733 berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp81.828.859.733 dan Pendapatan Hibah sebesar Rp0 atau mencapai 87,35 persen dari estimasi Pendapatan LRA sebesar Rp93.675.260.000,00.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2023 adalah sebesar Rp196.489.212.918 atau mencapai 86,78 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp226.416.932.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada 31 Desember 2023. Nilai Aset per 31 Desember 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp697.030.173.000 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp29.215.843.185; Piutang Jangka Panjang sebesar Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp666.905.126.440 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp909.203.375.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp12.858.674.901 dan Rp684.171.498.099

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp175.966.363.629 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp141.297.425.420 sehingga terdapat Surplus dari Kegiatan Operasional sebesar Rp34.668.938.209, Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp35.293.095 dan Rp0 sehingga entitas mengalami Surplus-LO sebesar Rp34.704.231.304.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2022 sebesar Rp626.552.200.294, ditambah Surplus-LO sebesar Rp34.704.231.304 kemudian Transaksi Antar Entitas sebesar 0 dan kenaikan (penurunan) ekuitas sebesar 57.619.297.805, sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2023 adalah senilai Rp684.171.498.099

5. LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023.

Saldo Awal Kas sebesar Rp14.187.714.947 ditambah dengan jumlah arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar Rp307.354.338.229, jumlah arus kas bersih dari aktivitas investasi sebesar Rp65.942.493.858, jumlah arus kas bersih dari aktivitas pendanaan sebesar Rp0, jumlah arus kas bersih dari aktivitas transitoris sebesar Rp0 serta koreksi sebesar Rp22.915.246.501 sehingga Saldo Akhir Kas pada akhir periode sampai dengan sebesar Rp410.399.793.535.

6. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Perubahan SAL) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) selama periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Saldo Anggaran Lebih (SAL) awal 1 Januari 2023 adalah sebesar Rp14.187.714.947, penggunaan SAL awal Rp0, Selisih lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA) akhir sebesar Rp-114.660.353.185 dan koreksi pembukuan Rp0, dan lain-lain Rp-22.915.246.501 sehingga Saldo Anggaran Lebih Tahun sebesar Rp-28.970.254.843.

7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan Atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis suatu nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Arus Kas, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CALK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan diajarkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL dan Laporan Arus Kas untuk yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis akrual.

1	Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan
2	Perbandingan Realisasi Pendapatan Tahunan Unaudited TA 2021 dan 2020
3	Perbandingan PNBP Tahunan Unaudited TA 2021 dan 2020
4	Perbandingan Hibah Tahunan Unaudited TA 2021 dan 2020
5	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahunan Unaudited TA 2021
6	Perbandingan Realisasi Belanja Tahunan Unaudited TA 2021 dan 2020
7	Perbandingan Belanja Pegawai Tahunan Unaudited TA 2021 dan 2020
8	Perbandingan Belanja Barang Tahunan Unaudited TA 2021 dan 2020
9	Perbandingan Belanja Modal Tahunan Unaudited TA 2021 dan 2020
10	Perbandingan Belanja Modal Tanah Tahunan Unaudited TA 2021 dan 2020
11	Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahunan Unaudited TA 2021 dan 2020
12	Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahunan Unaudited TA 2021 dan 2020
13	Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi & Jaringan Tahunan Unaudited TA 2021 dan 2020
14	Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya Tahunan Unaudited TA 2021 dan 2020
15	Rincian Kas di Kas di Bendahara Pengeluaran Tahunan Unaudited TA 2021 dan 2020
16	Rincian Kas di Kas pada Badan Layanan Umum Tahunan Unaudited TA 2021 dan 2020
17	Kas Lainnya dan Setara Kas Tahunan Unaudited TA 2021 dan 2020
18	Rincian Kas di Bendahara Penerimaan Tahunan Unaudited TA 2021 dan 2020
19	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Operasional BLU Tahunan Unaudited TA 2021 dan 2020
20	Rincian Piutang dari Kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum Tahunan Unaudited TA 2021 dan 2020
21	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU Tahunan Unaudited TA 2021 dan 2020
22	Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima Tahunan Unaudited TA 2021 dan 2020
23	Rincian Persediaan yang Belum Diregister Tahunan Unaudited TA 2021 dan 2020
24	Rincian Tanah Tahunan Unaudited TA 2021
25	Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahunan Unaudited Tahun 2021
26	Rincian Aset Tak Berwujud Tahunan Unaudited Tahun 2021
27	Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya
28	Rincian Utang kepada Pihak Ketiga
29	Rincian Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat Tahunan Unaudited TA 2021 dan 2020
30	Rincian Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Lainnya Tahunan Unaudited TA 2021 dan 2020
31	Rincian Pendapatan Hibah BLU Tahunan Unaudited TA 2021 dan 2020
32	Rincian Pendapatan Hasil Kerjasama BLU Tahunan Unaudited TA 2021 dan 2020
33	Rincian Pendapatan BLU Lainnya Tahunan Unaudited TA 2021 dan 2020
34	Rincian Beban Pegawai Tahunan Unaudited TA 2021 dan 2020
35	Rincian Beban Persediaan Tahunan Unaudited TA 2021 dan 2020
36	Rincian Beban Barang dan Jasa Tahunan Unaudited TA 2021 dan 2020
37	Rincian Beban Pemeliharaan Tahunan Unaudited TA 2021 dan 2020
38	Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahunan Unaudited TA 2021 dan 2020
39	Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahunan Unaudited TA 2021 dan 2020
40	Rincian Beban Bantuan Sosial Tahunan Unaudited TA 2021 dan 2020
41	Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahunan Unaudited TA 2021 dan 2020
42	Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahunan Unaudited TA 2021 dan 2020
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	

A. PENJELASAN UMUM**A.1.**

Dasar hukum Entitas dan Rencana Strategis

UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember berdiri sejak tahun 1966 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 4 Tahun 1966 tanggal 21 Februari 1966. Sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 37 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, memiliki fakultas sebagai berikut:

- a. Tarbiyah dan Ilmu Keguruan;
- b. Syariah;
- c. Ushuluddin, Adab dan Humaniora;
- d. Dakwah;
- e. Ekonomi dan Bisnis Islam.

UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember secara resmi menjadi Badan Layanan Umum (BLU) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor KMK 319/KMK.05/2021 tanggal 2 Agustus 2021 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember sebagai instansi pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan (Pasal 25,26, dan 27), Badan Layanan Umum perlu membuat dan menerapkan sistem informasi manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan dan praktik bisnis yang sehat.

Sehubungan dengan itu agar sistem akuntansi dan laporan keuangan BLU Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dapat dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, maka perlu disusun ketentuan tentang Pedoman Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri (BLU UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember merupakan pengembangan dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang didirikan pada tahun 1968 berdasarkan keputusan Menteri Agama RI No. 56 Tahun 1968. Kemudian IAIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember statusnya berubah menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 57 Tahun 2005 tanggal 10 Oktober 2005.

UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang meliputi program pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi keagamaan Islam, dan ilmu umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember memiliki tujuan :

- Terwujudnya pendidikan tinggi yang profesional, akuntabel, dan berdaya saing di tingkat nasional dan ASEAN dalam rangka memperkuat pembangunan Nasional;
- Menyelenggarakan proses perkuliahan, penelitian dan kajian ilmiah dengan bingkai akhlak karimah berbasis wahyu memandu ilmu untuk mengembangkan pengetahuan dan teknologi;
- Menyelenggarakan pengabdian untuk mengembangkan dan memberdayakan masyarakat menuju tatanan masyarakat madani yang demokratis dan berkeadilan;
- Menyelenggarakan tri darma perguruan tinggi yang berorientasi pada pembentukan jiwa entrepreneurship di kalangan civitas akademika.

Saat ini UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember telah memiliki kampus yang berlokasi di Jalan Mataram No.1 Mangli Jember

Secara umum, gambaran mengenai struktur organisasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung Tahun adalah sebagai berikut :



A.2. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Tahun 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3 BASIS AKUNTANSI

Dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan BLU yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas menggunakan basis akrual. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) 13 tentang penyajian Laporan Keuangan BLU.

A.4. DASAR PENGUKURAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai proses historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama yang merupakan entitas pelaporan dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan / atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada adalah sebagai berikut:
 - a. Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.
 - b. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu
 - c. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang		Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak Tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.	1. Satu bulan terhitung sejak Tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	2. Piutang telah diserahkan kepada panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Sesuai PSAP No.05 - Akuntansi Persediaan, FIFO merupakan salah satu metode pencatatan yang dapat digunakan oleh Pemerintah dalam mengukur nilai persediaan. Persediaan yang masuk terlebih dahulu dicatat sebagai persediaan yang pertama kali keluar. Nilai persediaan keluar dicatat sesuai dengan urutan (sequential) masuk persediaan. Diterapkan untuk seluruh jenis persediaan (masing-masing persediaan per kode barang) dan seluruh jenis transaksi persediaan keluar.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapasitas sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapasitas tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklafikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN / BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan Aset Tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Perhitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 Tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 Tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 Tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Penggolongan Masa manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tetap Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas, Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-Lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - Kewajiban Jangka Pendek**
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
Kewajiban Jangka Pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - Kewajiban Jangka Panjang**
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai normal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja, antara lain :

Uraian	2023	
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	93.675.260.000	93.675.260.000
Penerimaan Hibah	-	-
Jumlah Pendapatan	93.675.260.000	93.675.260.000
Belanja		
Belanja Pegawai	64.316.041.000	53.696.408.000
Belanja Barang	73.047.059.000	63.288.507.000
Belanja Modal	72.883.832.000	39.281.294.000
Belanja Bantuan Sosial	16.170.000.000	12.592.800.000
Jumlah Belanja	226.416.932.000	168.859.009.000

Realisasi Pendapatan
Rp81.828.859.733

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp81.828.859.733 atau mencapai 87,35 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp93.675.260.000. Pendapatan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember terdiri dari Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp81.828.859.733 dan Penerimaan Hibah sebesar Rp0 dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2023		
	Anggaran	Realisasi	% terhadap anggaran
Penerimaan Negara Bukan Pajak	93.675.260.000	81.828.859.733	87,35
Penerimaan Hibah	-	-	-
Jumlah	93.675.260.000	81.828.859.733	87,35

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Rp 81.828.859.733 sebesar 9,61 persen, dan Penerimaan Hibah sebesar 0,00 persen. Rincian pendapatan adalah sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi Pendapatan Tahunan (Audited) TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A. 2022	%
Penerimaan Negara Bukan Pajak	81.828.859.733	74.652.396.634	9,61
Penerimaan Hibah	-	-	-
Jumlah	81.828.859.733	74.652.396.634	9,61

B.1.1 Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp81.828.859.733 dan Rp74.652.396.634. Penerimaan Negara Bukan Pajak mengalami kenaikan sebesar 9,61 %. penurunan pendapatan jasa pelayanan pendidikan disebabkan karena tahun ini UIN Raden Intan Lampung tidak menjadi bendahara SPAN PTKIN seperti tahun sebelumnya, sehingga uang masuk pendaftaran mahasiswa baru tidak masuk kedalam pendapatan jasa layanan pendidikan. . Adapun rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah sebagai berikut :

Perbandingan PNBPN Tahunan (Audited) TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A. 2022	%
Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	79.281.218.000	72.662.902.600	9,11
Pendapatan Jasa Layanan Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan	8.000.000		
Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Pemda	-	1.371.933.500	(100,00)
Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	1.002.459.188	158.450.859	532,66
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang	38.726.000		
Pendapatan Lain-lain BLU	685.291.776	8.832.600	7.658,66
Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Tanah	85.500.000		
Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung	384.299.999	107.150.000	258,66
Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan	61.900.000		
Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Peralatan dan Mesin	900.000	900.000	-
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan		5.000.000	(100,00)
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	194.668.000	-	-
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	161.458	-	-
Jumlah	81.828.859.733	74.652.396.634	9,61

B.1.2 Penerimaan Hibah

Realisasi Penerimaan Hibah untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Penerimaan Hibah adalah sebagai berikut :

Perbandingan Hibah Tahunan (Audited) TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A. 2022	%
PENDAPATAN HIBAH DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI	-	-	-
PENDAPATAN PENGEMBALIAN HIBAH TAYL	-	-	-
Jumlah	-	-	-

B.2 Belanja

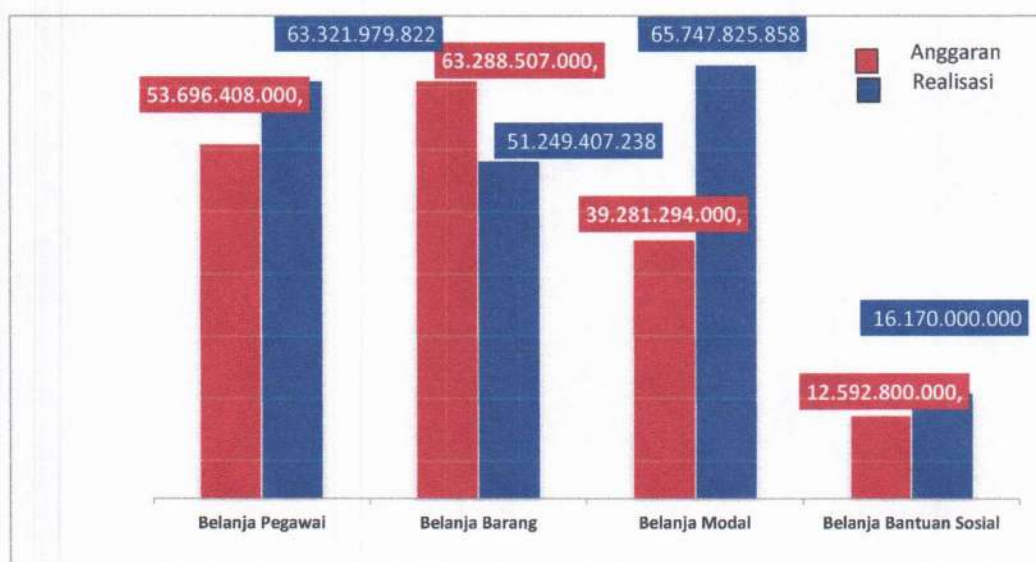
Realisasi Belanja pada TA 2023 adalah sebesar Rp196.489.212.918 atau 86,78 % dari anggaran belanja sebesar Rp.226.416.932.000 Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahunan (Audited) TA 2023

URAIAN	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2023		
	Anggaran	Realisasi	% thdp Angg.
Belanja Pegawai	64.316.041.000	63.321.979.822	98,45
Belanja Barang	73.047.059.000	51.249.407.238	70,16
Belanja Modal	72.883.832.000	65.747.825.858	90,21
Belanja Bantuan Sosial	16.170.000.000	16.170.000.000	100,00
Jumlah	226.416.932.000	196.489.212.918	86,78

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

Komposisi Anggaran dan Realisasi Tahun 2023



Dibandingkan dengan TA 2022, Realisasi Belanja TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 39,36%. . Berikut rincian realisasi belanja TA 2023 dan TA 2022 :

Perbandingan Realisasi Belanja Tahunan (Audited) TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A 2023	REALISASI T.A. 2022	%
Belanja Pegawai	63.321.979.822	51.902.151.165	22,00
Belanja Barang	51.249.407.238	48.735.688.348	5,16
Belanja Modal	65.747.825.858	27.829.326.213	136,25
Belanja Bantuan Sosial	16.170.000.000	12.526.800.000	29,08
Jumlah	196.489.212.918	140.993.965.726	39,36

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp63.321.979.822 dan Rp51.902.151.165. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus sebagai PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi Belanja Pegawai TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 22,00 % dari TA 2022. Hal ini disebabkan adanya kenaikan tunjangan tenaga pendidik Non PNS.

Perbandingan Belanja Pegawai Tahunan (Audited) TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A. 2022	%
Belanja Gaji Pokok PNS	19.059.946.800	18.402.700.980	3,57
Belanja Pembulatan Gaji PNS	288.891	267.571	7,97
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	1.549.151.398	1.488.742.488	4,06
Belanja Tunj. Anak PNS	468.393.588	445.656.425	5,10
Belanja Tunj. Struktural PNS	150.230.000	188.240.000	(20,19)
Belanja Tunj. Fungsional PNS	4.030.114.000	3.634.165.000	10,90
Belanja Tunj. PPh PNS	160.691.096	146.897.944	9,39
Belanja Tunj. Beras PNS	1.158.357.900	1.131.924.600	2,34
Belanja Uang Makan PNS	3.013.086.000	4.382.446.000	(31,25)
Belanja Tunjangan Umum PNS	154.840.000	198.350.000	(21,94)
Belanja Tunjangan Profesi Dosen	9.126.137.000	8.155.517.900	11,90
Belanja Tunjangan Kehormatan Profesor	1.835.332.000	1.071.036.400	71,36
Beban Tunjangan Tenaga Pendidik Non PNS	618.627.000		
Beban Gaji Pokok PPPK	245.912.400		
Pembulatan Beban Gaji PPPK	2.560		
Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	16.034.240		
Beban Tunjangan Anak PPPK	5.186.968		
Beban Tunjangan Fungsional PPPK	34.600.000		
Beban Tunjangan Beras PPPK	15.642.720		
Beban Uang Makan PPPK	40.959.000		
Belanja Uang Lembur	25.752.000	165.153.000	(84,41)
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	21.445.650.120	12.523.290.958	71,25
Beban Pegawai Tunjangan Khusus/ Kegiatan/ Kinerja PPPK	175.980.998	-	-
Jumlah Belanja kotor	63.330.916.679	51.934.389.266	19,72
Pengembalian Belanja Pegawai	(8.936.857)	32.238.101	(127,72)
Jumlah Belanja	63.321.979.822	51.902.151.165	22,00

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp51.249.407.238 dan Rp48.735.688.348. Belanja Barang adalah pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan. Realisasi Belanja Barang TA 2023 mengalami kenaikan 5,16 % dari Realisasi TA 2022.

Hal ini antara lain disebabkan oleh

Perbandingan Belanja Barang Tahunan (Audited) TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A. 2022	%
--------	---------------------	---------------------	---

URAIAN	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A. 2022	%
Belanja Barang Operasional	1.351.319.726	1.558.569.095	(13,30)
Belanja Barang Non Operasional	4.079.995.922	4.759.873.936	(14,28)
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	805.611.302	937.214.818	(14,04)
Belanja Jasa	5.075.617.731	4.019.104.164	26,29
Belanja Pemeliharaan	1.084.537.455	1.274.748.309	(14,92)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	1.251.536.583	1.675.366.256	(25,30)
Belanja Perjalanan Luar Negeri	-	127.670.871	(100,00)
Belanja Barang BLU	37.600.788.519	34.530.385.299	8,89
Jumlah Belanja	51.249.407.238	48.735.688.348	5,16

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal
Rp65.747.825.858

Realisasi Belanja Modal per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp65.747.825.858 dan Rp27.829.326.213. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 445,07 % dibandingkan TA 2022 disebabkan oleh sisa pagu belanja modal SBSN yang harus direalisasikan untuk tahun ini hanya 26,37% dari keseluruhan pagu multiyears.

Perbandingan Belanja Modal Tahunan (Audited) TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022	%
Belanja Modal Tanah - BLU	38.589.975.000	9.562.359.000	303,56
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU	5.511.075.225	2.090.012.500	163,69
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLU	21.257.989.633	-	-
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - BLU	-	-	-
Belanja Modal Modal Lainnya - BLU	388.786.000	409.882.000	(5,15)
Jumlah Belanja	65.747.825.858	12.062.253.500	445,07

B.5.1 Belanja Modal Tanah - BLU

Realisasi Belanja Modal
Tanah - BLU
Rp38.589.975.000

Realisasi Belanja Modal Tanah - BLU per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp38.589.975.000 dan Rp9.562.359.000. Realisasi tersebut pada TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 303,56 % dibandingkan TA 2022. Hal ini disebabkan oleh belum ada realisasi belanja modal tanah sampai dengan triwulan iii 2022.

Perbandingan Belanja Modal Tanah Tahunan (Audited) TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022	%
Belanja Modal Tanah - BLU	38.589.975.000	9.562.359.000	303,56
Jumlah Belanja Kotor	38.589.975.000	9.562.359.000	303,56
Pengembalian Belanja Modal Tanah	-	-	-
Jumlah Belanja	38.589.975.000	9.562.359.000	303,56

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin- BLU

Realisasi Belanja Modal
Peralatan dan Mesin-BLU
Rp1.557.596.125

#REF!

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahunan (Audited) TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.511.075.225	2.090.012.500	163,69